

**KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN
RUMAH TANGGA MASYARAKAT
PERKOTAAN
(KASUS KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

FIRZA MAHARDHIKA HAKIKI

NIM. C2B 008 082

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Firza Mahardhika Hakiki

Nomor Induk Mahasiswa : C2B008082

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/IESP

Judul Skripsi : **KETIMPANGAN DISTRIBUSI
PENDAPATAN RUMAH TANGGA
MASYARAKAT PERKOTAAN
(KASUS KECAMATAN BANJARSARI
KOTA SURAKARTA)**

Dosen Pembimbing : Banatul Hayati, SE., M.Si.

Semarang, 10 Agustus 2015

Dosen Pembimbing,

(Banatul Hayati, SE., M.Si.)
NIP. 196803161998022001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Firza Mahardhika Hakiki

Nomor Induk Mahasiswa : C2B008082

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/IESP

Judul Skripsi : **KETIMPANGAN DISTRIBUSI**

PENDAPATAN RUMAH TANGGA

MASYARAKAT PERKOTAAN

(KASUS KECAMATAN BANJARSARI

KOTA SURAKARTA)

Telah dinyatakan lulus ujian skripsi pada tanggal Agustus 2015

Tim Penguji :

1. Banatul Hayati, SE., M.Si. (.....)

2. Prof. Dr. Purbayu Budi Santosa, MS. (.....)

3. Darwanto, SE., M.Si (.....)

Mengetahui,

Pembantu Dekan I

Anis Chariri. SE., Mcom., PhD., Akt
NIP. 196708091992031001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, FIRZA MAHARDHIKA HAKIKI, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN RUMAH TANGGA MASYARAKAT PERKOTAAN (KASUS KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA) adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudisn terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 10 Agustus 2015

Yang membuat pernyataan,

(Firza Mahardhika Hakiki)

NIM. C2B008082

ABSTRACT

Income differences arise because of differences in the ownership of resources and production factors, especially the ownership of capital goods (capital stock). Party (groups) that have more production factors will earn more income as well. Work factor determines the general population that income differences.

This study uses primary data collected from households of civil servants, traders, and Labour in Urban Village Sumber, Nusukan, and Kadapiro Banjarsari District of Surakarta. The analytical method used is the Gini Ratio and the World Bank criteria.

Research Shows that there are districts Banjarsari income inequality were classified as moderate, high inequality comes from merchant livelihood group valued at 0.471. This happens because of the differences in products sold and capital at each merchant.

*Keywords : Income Distribution, urban communities, gini ratio, and criteria
World Bank*

ABSTRAK

Perbedaan pendapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi terutama kepemilikan barang modal (capital stock). Pihak (kelompok masyarakat) yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak pula. Faktor pekerjaan penduduk umumnya menjadi penentu terjadinya perbedaan pendapatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari responden rumah tangga PNS, Pedagang, dan Buruh yang ada di Kelurahan Sumber, Nusukan, dan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Metode analisis yang digunakan adalah Gini Ratio dan Kriteria Bank Dunia.

Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa kecamatan Banjarsari masih terdapat ketimpangan pendapatan yang tergolong sedang, ketimpangan tinggi berasal dari kelompok mata pencaharian pedagang senilai 0,471. Hal tersebut terjadi karena perbedaan dalam produk yang dijual dan permodalan pada setiap pedagang.

Kata kunci : Distribusi Pendapatan, masyarakat perkotaan, gini ratio, dan kriteria Bank Dunia

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“ THERE'S FINE LINE BETWEEN BRAVERY AND STUPIDITY”

-FMH-

“SAYA PERCAYA KEPADA SETIAP ORANG, SAYA HANYA
TIDAK PERCAYA KEPADA IBLIS DALAM TUBUH SESEORANG”

-FMH-

Skripsi ini saya persembahkan kepada sahabat tercinta dan tersayang dengan segenap kerendahan hati, terimakasih.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN RUMAH TANGGA MASYARAKAT PERKOTAAN (KASUS KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA)”**. Penulisan skripsi ini merupakan syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) jurusan Ilmu Ekonomi studi Pembangunan Universitas Diponegoro.

Penelitian ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Suharnomo, M.Si. selaku dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Banatul Hayati, SE., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu memberikan pengarahan dan petunjuk kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi.
3. Dra. Tri Wahyu Rejekiningsih, M.Si. selaku dosen wali yang memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh studi.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro baik dari IESP, Manajemen, dan Akuntansi yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu selama penulis menempuh studi.

5. Bahruddin Noor, SE. Akt, Nanik Riyanti, Firdaus Hakiki, dan Fadhil Hakiki selaku keluarga penulis yang telah memberikan banyak sekali dukungan, semangat, motivasi, kasih sayang, dan doa dalam penyelesaian skripsi.
6. Maretha Eka Fitriana yang selalu memberikan support kepada saya sekaligus penyemangat hidup saya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.
7. Windy Nafsitasari, S.Kom, Umi Kalsum, Grace Novita Soenaryo, Putri Novitasyahri, Amelia Silvia, Herlina Susanti, Siti Purnamasari, Aulia Nuriasari, Putri Wijayanti, Charolina Ayu Permatasari dan seluruh banteran yang pernah mengisi hidup saya yang mungkin saya lupa dan tidak tercantum namanya yang tak pernah lelah memberikan semangat dan bantuannya, serta salah satu alasan tulisan ini ada.
8. Stefani Putri, Dita Monica Sekarini, Emma sebagai adik – adik ketemu gedhe saya yang selalu membantu dan penyemangat skripsi saya.
9. Kawan – kawan seperjuangan di Gerakan mahasiswa nasional Indonesia yang telah memberikan banyak sekali pelajaran, pemahaman, dan persahabatan. Paman Bete, mas Roy, mas Gentong, Pangeran Jaya Theo, Wulan, Ucil, Ayip, Putra, Tito, Ketut, Finta, Jackson, Iis, Muji, Anggar, Silvi, Nicki, Akita, Ucup, Radit, Annas, Dika, Mudas, Danu, Dogol, Hendi, Jaya, Putri, Hafiz, David, Preketek, Januar, Yudha, Hendrik, Pepin, Adam, Oweh, Pecel, Kunto, Monic, Robi, Beta, dll yang belum disebutkan.
10. Kepengurusan HMJ IESP Reg 2 FEB UNDIP periode 2008/2009, Kepengurusan BEM FEB UNDIP periode 2010/2011, saya ucapkan terima

kasih atas semua pengalaman yang diberikan selama penulis aktif berorganisasi, JAYA EKONOMI!!!

11. Kawan – kawan IESP reg 2 2008, atas segala semangat dan persahabatanya, JAYA IESP!!!
12. Budie, Citra Wulansari, Siti Chasanah, Roby Assa Rinaldi, Langgeng Waskito, Jamal, Fendi Restu, Kemins, Juliduts, Kundank Idut, Ikhsan, dan seluruh rekan – rekan kantor MATCH Production yang telah menyumbangkan pikiran dan ide – ide brilliant.
13. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan karena pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang terbatas. Penulis mohon maaf jika dalam penyusunan skripsi ini masih kurang berkenan dalam pandangan pembaca, semoga ini bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk penelitian yang lebih baik di masa yang akan datang.

Semarang, 10 Agustus 2015

Firza Mahardhika Hakiki

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1.4 Sistematika Penulisan	13
BAB II. TELAAH PUSTAKA	15
2.1 Landasan Teori.....	15
2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi	15
2.1.2 Distribusi Pendapatan	19
2.1.3 Ketimpangan Antar Daerah	21
2.1.4 Pembangunan dengan Pemerataan.....	24
2.1.5 Kurva Lorenz	26
2.1.6 Indeks Gini atau Rasio Gini.....	29
2.2 Penelitian Terdahulu	32
2.3 Kerangka Pemikiran.....	33
BAB III. METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	35
3.1.1 Variabel Penelitian.....	35
3.1.2 Definisi Operasional	35
3.2 Jenis Dan Metode Pengumpulan Data	37
3.3 Metode Pengambilan Sampel	38
3.4 Metode Analisis	39
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Gambaran Umum Kota Surakarta.....	41
4.1.1 Gambaran Umum Responden.....	44
4.1.1.1 Kelompok PNS/TNI/POLRI	45
4.1.1.2 Kelompok Pedagang.....	47
4.1.1.3 Kelompok Buruh	49
4.2 Ketimpangan Pendapatan Antar Golongan Mata Pencaharian di Kota Surakarta	51

4.2.1 Ketimpangan Pendapatan Berdasarkan Gini Rasio.....	51
4.2.2 Ketimpangan Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	54
4.3 Ketimpangan Pengeluaran Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	58
4.3.1 Ketimpangan Pengeluaran Kelompok PNS/TNI/POLRI.....	58
4.3.2 Ketimpangan Pengeluaran Kelompok Pedagang	60
4.3.3 Ketimpangan Pengeluaran Kelompok Buruh.....	62
4.3.4 Ketimpangan Pengeluaran Total Sampel	63
BAB V. PENUTUP.....	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Keterbatasan.....	67
5.3 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN – LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Gini Ratio Indonesia Tahun 2002, 2010 – 2013	4
Tabel 1.2	Gini Ratio menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Tahun 2002	7
Tabel 1.3	Penduduk Wilayah Kota Surakarta Kecamatan Banjarsari Berdasarkan Mata Pencaharian	10
Tabel 1.4	Standar Deviasi Sebaran Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta	9
Tabel 3.1	Populasi Penelitian	38
Tabel 4.1	Sampel Penelitian Berdasarkan Pekerjaan	45
Tabel 4.2	Karakteristik Sampel Penelitian Kelompok PNS/TNI/POLRI	45
Tabel 4.3	Karakteristik Sampel Penelitian Kelompok Pedagang	47
Tabel 4.4	Karakteristik Sampel Penelitian Kelompok Buruh	49
Tabel 5.1	Hasil Perhitungan Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Dengan Menggunakan Gini Rasio	52
Tabel 5.2	Distribusi Pengeluaran PNS/TNI/POLRI Kota Surakarta (Berdasarkan Kriteria Bank Dunia)	54
Tabel 5.3	Distribusi Pengeluaran Pedagang Kota Surakarta (Berdasarkan Kriteria Bank Dunia)	55
Tabel 5.4	Distribusi Pengeluaran Buruh Kota Surakarta (Berdasarkan Kriteria Bank Dunia)	56
Tabel 5.5	Distribusi Pengeluaran Total Sampel Kota surakarta (Berdasarkan Kriteria Bank Dunia)	57
Tabel 5.6	Alokasi Pengeluaran Kelompok PNS/TNI/POLRI	59
Tabel 5.7	Alokasi Pengeluaran Kelompok Pedagang	60
Tabel 5.8	Alokasi Pengeluaran Kelompok Buruh	62
Tabel 5.9	Alokasi Pengeluaran Total sampel	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kurva Lorenz.....	27
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	34
Gambar 4.1 Peta Lokasi Kota Surakarta.....	41
Gambar 5.1 Kurva Lorenz Ketimpangan Pengeluaran PNS/TNI/POLRI, Pedagang, Buruh dan Total Sampel.....	54
Gambar 5.2 Ketimpangan Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia.....	58
Gambar 5.3 Alokasi Pengeluaran.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A KUESIONER PENELITIAN

LAMPIRAN B TABULASI DATA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di negara berkembang masalah ketimpangan telah menjadi pembahasan utama dalam menetapkan kebijakan sejak tahun tujuh puluhan yang lalu. Perhatian ini timbul karena adanya kecenderungan bahwa kebijakan pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan semakin tingginya tingkat kesenjangan yang terjadi. Hal ini telah dikemukakan oleh beberapa Ahli ekonomi seperti: Kuznet (1996) dengan hasil penelitiannya di beberapa negara, demikian pula dengan Adelman dan Morris (1973) serta Chennery dan Syrquin (1975), menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat selalu diikuti dengan meningkatnya kesenjangan terutama pada tahap awal proses pembangunan ekonomi. Hasil penelitian ini telah mengembangkan anggapan yang menyatakan bahwa antara pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pembagian pendapatan terdapat suatu *trade-off*, dimana pertumbuhan ekonomi yang pesat akan membawa konsekuensi meningkatnya ketimpangan pembangunan dan hasil-hasilnya. Sebaliknya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang cukup baik akan dicapai dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif lambat atau diturunkan. (Sumber <https://elasq.wordpress.com/2010/08/03>)

Kuznets (1996), pada tahap – tahap awal pertumbuhan ekonomi pendistribusian pendapatan cenderung memburuk namun pada tahap – tahap berikutnya akan membaik. Hipotesis ini lebih dikenal sebagai hipotesis “U-

terbalik” Kuznets, sesuai dengan ukuran koefisien Gini dan pertumbuhan GNP per kapita yang akan terlihat seperti kurva yang berbentuk U-terbalik. Menurut Kuznets, distribusi pendapatan akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2000).

Tingginya Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara belum tentu mencerminkan meratanya terhadap distribusi pendapatan. Kenyataan menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat tidak selalu merata, bahkan kecenderungan yang terjadi justru sebaliknya. Distribusi pendapatan yang tidak merata akan mengakibatkan terjadinya disparitas. Indonesia yang tergolong dalam negara yang sedang berkembang tidak terlepas dari permasalahan ini.

Permasalahan ketimpangan pendapatan tidak dapat dipisahkan dari permasalahan kemiskinan, biasanya terjadi pada negara miskin dan berkembang. Lincoln Arsyad (1997) menjelaskan, banyak negara sedang berkembang yang mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 1960-an mulai menyadari bahwa pertumbuhan yang semacam itu hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan. Di negara-negara miskin yang menjadi perhatian utama adalah masalah pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Banyak orang merasakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi gagal untuk mengurangi bahkan menghilangkan besarnya kemiskinan absolut di Negara Sedang Berkembang (NSB). Dengan kata lain, pertumbuhan GNP (*Gross National Product*) per kapita yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bahkan, pertumbuhan GNP per kapita di beberapa negara yang sedang berkembang (seperti India, Pakistan, Kenya) telah menimbulkan

penurunan absolut dalam tingkat hidup penduduk miskin baik di perkotaan maupun pedesaan. (Sumber <http://agnienanditha.blogspot.com/2011/11/ekonomi-pembangunan.html>)

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena distribusi pendapatan merupakan ukuran kemiskinan relatif. Ukuran distribusi pendapatan perorangan merupakan yang paling umum digunakan. Masalah yang umumnya dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang berada dibawah garis kemiskinan (*poverty line*) (Tambunan, 2001).

Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbeaanya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya.

Perhitungan Distribusi Pendapatan dapat dilihat melalui besarnya Gini Rasio. Gini Rasio merupakan ukuran ketidakmerataan agregat dan nilainya terletak antara 0 (kemerataan sempurna) sampai 1 (ketidakmerataan sempurna). Menurut Lincoln Arsyad (1997), angka koefisien Gini dari negara – negara yang mengalami ketidakmerataan sedang antara 0,36 – 0,49; dan yang mengalami

ketidakmerataan rendah berkisar antara 0,20 – 0,35. Todaro (2000) menjelaskan angka ketimpangan bagi negara yang tajam berkisar antara 0,50 sampai 0,70 dan bagi negara yang tingkat distribusi pendapatannya relatif baik berkisar antara 0,20 hingga 0,35.

Selama 10 tahun terakhir ketimpangan pendapatan di Indonesia meningkat cukup pesat. Koefisien Gini, indikator standar ketimpangan, setelah cukup stabil pada level moderate yaitu sekitar 0.329 di akhir 2002 mulai meningkat menjadi 0.413 pada tahun 2013. Ini merupakan angka koefisien Gini tertinggi yang pernah tercatat di Indonesia. Dengan angka ini, Indonesia sudah bisa dikategorikan sebagai negara yang relatif tinggi ketimpangan pendapatannya.

Tabel 1.1
Gini Ratio Indonesia 2002, 2010 – 2013

Provinsi	2002	2010	2011	2012	2013
Sumatera	0.269	0.327	0.342	0.350	0.358
Jawa	0.317	0.372	0.400	0.398	0.406
Bali dan Nusa Tenggara	0.285	0.383	0.377	0.380	0.373
Kalimantan	0.286	0.353	0.373	0.363	0.369
Sulawesi	0.273	0.392	0.398	0.398	0.412
Maluku dan Papua	N.A	0.365	0.390	0.398	0.390
INDONESIA	0.329	0.380	0.410	0.410	0.413

Sumber : BPS, 2014

Berbagai indikator ketimpangan yang lain juga menunjukkan tren yang serupa. Sebagai contoh pada tahun 2014, www.kompas.com menyebutkan adanya 19 orang Indonesia yang masuk dalam daftar orang terkaya dunia versi *Forbes*. Di sisi lain, pendapatan perkapita rata – rata Indonesia menempati urutan 120 dunia versi IMF dan peringkat 105 versi Bank Dunia (www.wikipedia.com, 2014).

Ketimpangan memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari adanya ketimpangan adalah dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yang ekstrim antara lain in-efisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro, 2003)

Sebagai salah satu negara yang terdiri dari ribuan pulau, perbedaan karakteristik wilayah adalah konsekuensi yang tidak dapat dihindari oleh Indonesia. Karena karakteristik wilayah mempunyai pengaruh kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi di Indonesia tidak seragam. Ketidakteragaman ini berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh yang pada gilirannya mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh ini kemudian menyebabkan terjadinya ketimpangan baik pembangunan maupun pendapatan antar daerah.

Perbedaan pendapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi terutama kepemilikan barang modal (*capital stock*). Pihak (kelompok masyarakat) yang memiliki faktor produksi yang lebih

banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak pula. Faktor pekerjaan penduduk umumnya menjadi penentu terjadinya perbedaan pendapatan tersebut.

Kondisi ini merupakan tantangan pembangunan yang harus dihadapi mengingat masalah kesenjangan itu dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta dapat menyulitkan kita dalam melaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan pemerataan. Ketimpangan merupakan permasalahan klasik yang tidak dapat dimusnahkan, melainkan hanya bisa dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh suatu siste sosial tertentu agar keselarasan dalam sistem tersebut tetap terpelihara dalam proses pertumbuhannya.

Di era otonomi daerah sekarang ini, setiap daerah dituntut untuk mampu mengelola potensi daerah yang dimilikinya secara tepat sehingga akan mendorong terciptanya proses pembangunan dengan tingkat pemerataan yang baik dan disertai pertumbuhan ekonomi yang baik pula. Dengan demikian ketimpangan pembangunan dan hasil-hasilnya serta pendapatan antar golongan ataupun daerah akan semakin menurun.

Tabel 1.2
Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Tahun 2012

Kabupaten/Kota	Gini Ratio		
Kab. Pemalang	0,2451	Kab. Demak	0,3429
Kab. Pekalongan	0,2824	Kab. Kebumen	0,345
Kab. Pati	0,2935	Kota Salatiga	0,3458
Kab. Batang	0,3051	Kab. Temanggung	0,3479
Kab. Purworejo	0,312	Kota Semarang	0,3518
Kab. Tegal	0,3188	Kab. Sukoharjo	0,3524
Kab. Cilacap	0,3198	Kab. Grobogan	0,3535
Kab. Wonogiri	0,3224	Kab. Jepara	0,3547
Kab. Brebes	0,3237	Provinsi Jawa Tengah	0,3554
Kab. Magelang	0,325	Kab. Kendal	0,3557
Kab. Purbalingga	0,3256	Kab. Semarang	0,3583
Kota Pekalongan	0,3268	Kab. Sragen	0,3679
Kab. Rembang	0,3289	Kota Surakarta	0,3713
Kab. Klaten	0,3332	Kota Magelang	0,3715
Kota Tegal	0,3335	Kab. Wonosobo	0,3782
Kab. Banjarnegara	0,3336	Kab. Blora	0,3801
Kab. Kudus	0,3382	Kab. Boyolali	0,3843
Kab. Banyumas	0,3422	Kab. Karanganyar	0,3971

Sumber : BPS, diolah dari hasil Susenas 2012 Modul Konsumsi

Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang mempunyai tingkat ketimpangan yang tergolong tinggi diantara kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapatan pada masyarakat perkotaan berdasarkan data tersebut yang berarti bahwa distribusi pendapatan masyarakat kota kurang merata.

Kota Surakarta terbagi menjadi 5 Kecamatan yaitu Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon dan Banjarsari. Dan peneliti bermaksud untuk meneliti pada kecamatan Banjarsari karena di Kecamatan tersebut mempunyai penduduk terbanyak dengan mata pencaharian yang lebih variatif.

Berdasarkan tabel 1.2, Kota Surakarta merupakan kota dengan indeks Gini yang tinggi setelah kota Magelang, Boyolali, dan Karanganyar. Hal ini berarti Kota Surakarta termasuk kota yang Berdasarkan Tabel 1.3 Kecamatan Banjarsari terdiri dari 13 Kelurahan dimana tiga kelurahan di kecamatan Banjarsari yaitu kelurahan Sumber, Nusukan, dan Kadipiro memiliki deviasi perbedaan jumlah tenaga kerja formal dan non formal yang tinggi sehingga dipilih sebagai sampel lokasi penelitian.

Perbedaan klasifikasi mata pencaharian akan berpengaruh terhadap besarnya pendapatan yang diterima oleh masing – masing kelompok mata pencaharian. Perbedaan penghasilan ini akan berdampak pada ketimpangan pendapatan antar golongan pendapatan masyarakat berdasarkan mata pencaharian. Variasi mata pencaharian pada masyarakat perkotaan lebih beragam sehingga memungkinkan terjadi ketimpangan pendapatan lebih besar.

Sebagai gambaran wilayah, kondisi mata pencaharian penduduk di wilayah Kecamatan Banjarsari sebagai pusat dari Kota Surakarta pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

(Tabel terlampir pada Halaman 10)

Berdasarkan Tabel 1.3 tersebut menunjukkan bahwa distribusi mata pencaharian penduduk di kelurahan–kelurahan di Kota Surakarta cukup bervariasi. Kondisi demikian mencerminkan kemungkinan besarnya ketimpangan pendapatan yang ada pada masing – masing kelurahan. Berdasarkan distribusi mata pencaharian pada beberapa sektor mata pencaharian tersebut selanjutnya diperoleh standar deviasi dari mata pencaharian tersebut.

Tabel 1.4
Standar deviasi sebaran mata pencaharian penduduk Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta

Kelurahan	Standar deviasi sebaran mata pencaharian
Mangkubumen	824.6216
Timuran	532.1111
Keprabon	273.6966
Ketelan	521.6120
Punggawan	698.1371
Kestalan	231.6927
Setabelan	294.3691
Gilingan	1566.0790
Manahan	997.9566
Sumber	3135.6844
Nusukan	2356.7807
Kadipiro	2237.3512
Banyuanyar	1569.6913

Sumber: BPS, 2012

Tabel 1.3
Penduduk wilayah Kota Surakarta
Kecamatan Banjarsari berdasarkan mata pencaharian

Kelurahan	Petani Sendiri	Buruh tani	Pemilik usaha	Buruh Industri	Buruh Bangunan	Pedagang	Angkutan	PNS/TNI/Polri	Pensiunan	Lain- lain	Jumlah
Mangkubumen	0	0	373	2374	308	1174	627	917	559	2110	8442
Timuran	0	0	63	135	620	183	21	246	199	1743	3210
Keprabon	0	0	397	827	57	465	37	50	62	281	2176
Ketelan	0	0	148	273	505	333	308	174	168	1789	3698
Punggawan	0	0	82	685	610	249	260	316	242	2357	4801
Kestalan	0	0	157	254	737	521	318	115	167	353	2622
Setabelan	0	0	521	874	175	375	25	48	65	463	2546
Gilingan	0	0	895	2799	4394	1784	1593	1555	1651	4455	19126
Manahan	0	0	100	2072	1977	324	45	1657	2477	1261	9913
Sumber	38	92	208	1029	897	623	296	758	458	10347	14746
Nusukan	0	0	177	1530	7853	1626	473	526	744	2393	15322
Kadipiro	103	414	613	5816	5690	2979	1734	1381	1010	4938	24678
Banyuanyar	210	230	90	2493	230	171	296	481	158	4899	9258

Sumber : BPS, 2012

Berdasarkan data sebaran mata pencaharian sebelumnya diperoleh bahwa sebaran terbesar terjadi di Kelurahan Sumber, diikuti oleh Kelurahan Nusukan dan Kelurahan Kadipiro, kondisi demikian memungkinkan adanya disparitas pendapatan yang besar di ketiga kelurahan tersebut.

Penelitian ini mengambil sampel di 3 Kelurahan di Kota Surakarta yaitu Kelurahan Sumber, Nusukan, dan Kadipiro untuk diteliti. Hal ini didasarkan pada deskripsi data sebelumnya yang menunjukkan bahwa sebaran mata pencaharian penduduk di tiga Kelurahan tersebut relatif paling tinggi di Kota surakarta. Selain itu 4 jenis mata pencaharian yaitu buruh industri, buruh bangunan, pedagang, dan PNS/TNI/POLRI yang dalam tujuan awal sebagai mata pencaharian yang banyak dimiliki oleh penduduk digunakan sebagai sampel penelitian dalam kaitanya dengan ketimpangan pendapatan.

Besar kecilnya pendapatan yang diterima sesuai klasifikasi mata pencaharian tentu sangat mempengaruhi pola pengeluaran masyarakat, hal inilah yang sangat dirasakan oleh sebagian besar penduduk di Kecamatan Banjarsari yang mana dengan berbedanya tingkat pendapatan yang diterima maka berbeda pula jumlah pengeluaran yang dikeluarkan. Indikator ketimpangan dan pengeluaran juga akan menjadi pijakan dalam strategi pembangunan dan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, oleh karena itu perlu suatu kajian sejauh mana tingkat ketimpangan pendapatan dan pengeluaran yang terjadi pada rumah tangga masyarakat kota di Kecamatan Banjarsari.

Dalam hal ini penulis bermaksud menganalisis berupa Penelitian dengan tujuan untuk mengetahui berapa besar ketimpangan distribusi pendapatan rumah

tangga masyarakat kota di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah. Judul dalam penelitian ini adalah **“Ketimpangan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Masyarakat Kota di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta”**

1.2 Rumusan Masalah

Distribusi pendapatan menjadi salah satu indikator kunci bagi pemerataan ekonomi di Indonesia. Namun permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah aspek ketimpangan pendapatan yang masih sangat besar yang mencerminkan distribusi pendapatan yang memiliki perbedaan yang besar antar penduduk. Upaya memperkecil ketimpangan pendapatan tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah, namun demikian selama 10 tahun terakhir ketimpangan pendapatan di Indonesia justru mengalami peningkatan, sehingga perlu untuk menerapkan strategi yang dapat mengena dalam upaya penurunan ketimpangan pendapatan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, tinjauan ilmiah mengenai aspek-aspek yang ada dalam ketimpangan dalam lingkup masyarakat yang lebih sempit yang terjadi perlu dikaji lebih jauh. Pengkajian ketimpangan yang terjadi di kota Surakarta dalam kecamatan Banjarsari sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi dengan tingkat ketimpangan dan paling beragam jenis mata pencaharian. Berkaitan dengan hal tersebut maka pertanyaan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terjadi ketimpangan pendapatan antar golongan mata pencaharian di kecamatan Banjarsari

2. Bagaimanakah gambaran kondisi ketimpangan pendapatan antar golongan mata pencaharian di kecamatan Banjarsari

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis besar ketimpangan pendapatan antar golongan mata pencaharian di kecamatan Banjarsari.
2. Mendiskripsikan dan menganalisis kondisi ketimpangan pendapatan antar golongan mata pencaharian di kecamatan Banjarsari.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Memberikan gambaran mengenai beberapa aspek yang berkaitan dengan ketimpangan pendapatan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah tersebut.
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan penanggulangan kemiskinan di kota Surakarta.
3. Sebagai refrensi bagi peneliti lain untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistem penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Merupakan Pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang, masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Merupakan Tinjauan Pustaka yang akan diuraikan landasan teoritis menjelaskan teori-teori yang mendukung penelitian, yang didukung dengan penelitian terdahulu. Kerangka pemikiran teoritis menjelaskan permasalahan yang akan diteliti.

BAB III : Metode Penelitian

Merupakan metode penelitian, berisi tentang uraian variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV: Hasil Dan Analisis

Merupakan hasil dan pembahasan, terdiri dari uraian analisis deskriptif dan objek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

BAB V : Penutup

Merupakan penutup yang memuat simpulan hasil analisis data dan pembahasan, keterbatasan dari penelitian, serta saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Distribusi pendapatan nasional adalah mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Distribusi pendapatan merupakan kriteria yang mengindikasikan mengenai penyebaran atau pembagian pendapatan atau kekayaan antar penduduk satu dengan penduduk lain dalam wilayah tertentu. (Dumairy, 1999)

2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi mencakup pengertian yang sangat luas dan tidak hanya sekedar menaikkan pendapatan perkapita pertahun saja. Bahkan indikator PNB, sebagai indikator utama, tidak selalu dapat menggambarkan suksesnya suatu pembangunan, indikator-indikator yang lain seperti pendidikan, distribusi pendapatan, jumlah penduduk miskin, juga menunjukkan keberhasilan pembangunan. Pengalaman pada dekade 1950-an dan tahun 1960-an telah membuktikan hal ini. Pada saat itu banyak negara – negara dunia ketiga mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi sesuai dengan target namun gagal dalam meningkatkan taraf hidup sebagian besar masyarakatnya. Masalah – masalah sosial seperti pengangguran, kesenjangan pendapatan, dan sebagainya tidak mengalami perbaikan. Melihat kenyataan ini, semakin banyak para ahli yang menganggap GNP (*Gross National Product*) sebagai indikator tunggal pembangunan tidak berhasil. Selama dekade tahun 1970-an mulai muncul

pandangan bahwa tujuan utama dari usaha – usaha pembangunan bukan menciptakan tingkat pertumbuhan GNP yang tinggi melainkan penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang.

Dalam pengertian ekonomi yang murni, pembangunan secara tradisional mengandung pengertian kapasitas perekonomian nasional yang kondisi ekonomi awalnya kurang lebih berada dalam keadaan statis untuk jangka waktu yang lama, untuk menghasilkan dan mempertahankan tingkat kenaikan produksi nasional kotor (PNK).

Pembangunan ekonomi dipandang sebagai kenaikan pendapatan perkapita dan lajunya pembangunan ekonomi dengan menggunakan tingkat pertambahan PDB (*Produk Domestik Bruto*) untuk tingkat nasional dan PDRB untuk tingkat wilayah atau regional. Tingkat PDB ini juga ditentukan oleh lajunya pertumbuhan penduduk lebih dari PDRB maka ini menunjukkan perubahan terhadap pendapatan perkapita, maka pertambahan PDRB ini tidak memperbaiki tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pembangunan menyangkut perubahan mendasar dari seluruh struktur ekonomi dan ini menyangkut perubahan – perubahan dalam produksi dan permintaan maupun peningkatan dalam distribusi pendapatan dan pekerjaan. Konsekuensinya adalah diciptakan perekonomian yang lebih beragam.

Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh kecenderungan kenaikan pendapatan perkapita dalam jangka panjang. Tapi ini bukan berarti kenaikan pendapatan perkapita yang terus – menerus. Banyak faktor yang dapat menyebabkan perekonomian

mengalami stagnan bahkan kemunduran perekonomian seperti perang, kekacauan politik, dan lain – lainnya. Apalagi jika kemunduran perekonomian hanya terjadi sementara saja dan perekonomian cenderung meningkat maka dapat dikatakan pembangunan ekonomi sedang berlangsung.

Atas dasar inilah maka pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai suatu proses saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor – faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi. Dengan cara ini maka dapat diketahui peristiwa – peristiwa apa saja yang menimbulkan peningkatan maupun penurunan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu tahap pembangunan ke tahap pembangunan lainnya.

Gant (1971) menjelaskan ada dua tahap dalam tujuan pembangunan yaitu tahap pertama pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Jika tujuan ini sudah tercapai maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan bagi warganya untuk dapat mencukupi segala kebutuhannya.

Adanya sasaran yang ingin dicapai dari pembangunan (Suryana, 2000:29) antara lain :

1. Dipenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan perumahan serta peralatan sederhana dari berbagai kebutuhan yang secara luas dipandang perlu oleh masyarakat yang memerlukan.
2. Dibutuhkan kesempatan yang luas untuk memperoleh berbagai jasa publik, pendidikan, kesehatan, pemukiman yang dilengkapi infrastruktur yang layak serta komunikasi dan lain – lain. Dijaminya hak untuk memperoleh kesempatan kerja yang produktif yang

memungkinkan adanya balas jasa yang setimpal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

3. Terbinanya prasarana yang memungkinkan produksi barang dan jasa atau pedagang internasional untuk memperoleh keuntungan dengan kemampuan untuk menyisihkan tabungan untuk pembiayaan usaha – usaha selanjutnya.
4. Menjamin partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek – proyek.

Pembangunan ekonomi merupakan usaha suatu masyarakat untuk dapat mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat, sedangkan usaha – usaha pembangunan secara keseluruhan meliputi juga usaha – usaha pembangunan sosial, politik dan kebudayaan. Dengan adanya pembatasan tersebut maka pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sadono Sukirno, 1985 : 13).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pembangunan ekonomi meliputi tiga sifat penting. Pembangunan ekonomi merupakan :

1. Suatu proses, yang berarti perubahan yang terjadi secara terus – menerus.
2. Usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita.
3. Kenaikan pendapatan per kapita itu harus berlaku dalam jangka panjang.

Di dalam analisis, pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai suatu proses yang saling berkaitan, berhubungan dan saling mempengaruhi antara faktor – faktor yang menghasilkan pembangunan itu sendiri. Sehingga pada akhirnya hasil dari pembangunan ekonomi tersebut dapat dilihat.

H.F. Wiliamson mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses dimana suatu negara dapat menggunakan sumber – sumber daya produksinya sedemikian rupa, sehingga dapat memperbesar produk per kapita negara tersebut.

2.1.2 Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan atau meratanya hasil pembangunan suatu daerah atau negara, baik yang diterima masing – masing orang ataupun dari kepemilikan faktor – faktor produksi dikalangan penduduknya. Distribusi pendapatan dibedakan menjadi dua ukuran pokok yaitu : distribusi ukuran, adalah besar atau kecilnya bagian pendapatan yang diterima masing – masing orang dan distribusi fungsional atau distribusi kepemilikan faktor – faktor produksi (Todaro, 2000)

Pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dapat menyebabkan ketimpangan melalui berbagai saluran (Bruckner. Et,al, 2014). Salah satunya saluran adalah teknologi dan perubahan struktural. Besar kecilnya pertumbuhan pendapatan dikendalikan oeh kemajuan teknologi, yang tergantung pada keahlian atau tidak, ketimpangan dapat meningkat atau turun. Globalisasi juga memperbesar ketimpangan (Bruckner. Et,al, 2014). Demikian juga, perdagangan dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan pekerja dengan menurunkan

pengangguran atau keuntungan relatif dari pekerja berpendapatan rendah (Helpman, Et,al, 2010).

Menurut Irma Adelma dan Chyintia Taft Morris (dalam Lincoln Arsyad, 1997) ada 8 hal yang menyebabkan ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan di Negara Sedang Berkembang yaitu :

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita.
2. Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang – barang.
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek – proyek yang padat modal (*Capital Insentive*), sehingga presentase pendapatan modal dari kerja tambahan besar dibandingkan dengan presentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial.
6. Pelaksanaan kebijakan industri impor yang mengakibatkan kenaikan harga – harga barang hasil industri untuk melindungi usaha – usaha golongan kapitalis.
7. Memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi Negara Sedang Berkembang dalam perdagangan dengan negara – negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara – negara maju terhadap barang – barang ekspor Negara Sedang Berkembang.

8. Hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain – lain.

2.1.3 Ketimpangan Antar Daerah

Peningkatan pendapatan perkapita memang menunjukkan tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah. Namun, meningkatnya pendapatan telah merata. Seringkali di negara – negara berkembang dalam perekonomiannya lebih menekankan penggunaan modal daripada penggunaan tenaga kerja sehingga keuntungan dari perekonomian tersebut hanya diminati sebagian masyarakat saja. Apabila ternyata pendapatan nasional tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi ketimpangan dalam distribusi pendapatan.

Berkaitan dengan menggunakan ekonomi regional, williamson (1965) menyatakan bahwa dalam tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah – daerah tertentu. Pada tahap yang lebih maju, dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tampak bahwa keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan.

Myrdal (1957) menyatakan bahwa tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effect*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effect*) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses normal akan meningkat bukannya menurun, sehingga mengakibatkan ketimpangan antar daerah (Arsyad, 1999).

Ketimpangan antar daerah juga disebabkan oleh mobilisasi sumber – sumber daya tersebut antara lain, akumulasi modal, tenaga kerja, dan sumber daya alam yang dimiliki. Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antar daerah dan antar sektor ekonomi suatu daerah. Melihat fakta ini dapat dikatakan bahwa disparitas regional merupakan konsekuensi dari pembangunan itu sendiri. Pendapatan perkapita banyak digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur ketimpangan dalam suatu daerah. Pendapat ini tidak dilihat dari tinggi rendahnya pendapatan melainkan apakah pendapatan tersebut terdistribusikan secara merata atau tidak ke seluruh masyarakat.

Alisjahbana dan Akita (2002) melakukan studi tentang kesenjangan pendapatan regional dengan membandingkan Cina dan Indonesia, dan menunjukkan bahwa terjadi penurunan kesenjangan selama krisis ekonomi. Kim (1996), dengan penelitian di Korea menjelaskan bahwa tidak ada bukti yang signifikan hubungan antara *inequality* dan pertumbuhan ekonomi. Yilmaz (2002), meneliti bagaimana pola dan struktur perekonomian cenderung konvergen atau divergen. Hasilnya menjelaskan bahwa perbedaan wilayah dan perilaku temporal dari perekonomian nasional mempunyai efek terhadap kecepatan kondisi konvergensi. Ying (2000) melakukan penelitian di Cina tentang kesenjangan regional di 30 propinsi di Cina periode 1978 – 1994.

Kuncoro (2002), dengan menggunakan indeks Entropy Theil, menjelaskan bahwa kebijakan diregulasi dan liberalisasi yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 1983 mendorong kecenderungan konsentrasi geografis di Indonesia. Martin

dan Ottaviano (2001), menyebutkan bahwa ada hubungan yang kuat antara pertumbuhan urbanisasi, tetapi juga karena adanya pengelompokan industri secara parsial terhadap pertumbuhan, untuk 16 negara di Eropa selama periode 1984 – 1995. Hasilnya menjelaskan bahwa persebaran yang sama untuk kegiatan ekonomi berpengaruh baik terhadap pertumbuhan ekonomi.

Isu kesenjangan ekonomi antar daerah telah lama menjadi bahan kajian para pakar ekonomi regional. Hendra Asmara (1975) merupakan peneliti pertama yang mengukur kesenjangan ekonomi antar daerah. Berdasarkan data dari tahun 1950 hingga 1960, ia menyimpulkan Indonesia merupakan negara dengan kategori kesenjangan daerah yang rendah apabila sektor migas diabaikan.

Ardani (1966) telah menganalisis kesenjangan pendapatan dan konsumsi antar daerah dengan menggunakan indeks Williamson 1968 – 1993 dan 1983 – 1993. Kesimpulannya mendukung hipotesis Williamson (1965) bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi terdapat kesenjangan kemakmuran antar daerah, namun semakin majunya pembangunan ekonomi kesenjangan tersebut semakin menyempit. Studi Ardani agaknya sejalan dengan hasil studi Akita dan Lukman (1994) yang menemukan tidak terdapatnya perubahan kesenjangan ekonomi antar daerah selama 1983 – 1990. Dalam konstelasi perkembangan terakhir di Indonesia, kesenjangan ekonomi setidaknya dapat dilihat dari tiga dimensi yaitu berdasarkan tingkat kemordenan, regional dan etnis. Dilihat dari tingkat kemordenan terdapat kesenjangan antara sektor modern dan sektor tradisional. Sektor modern umumnya berada di perkotaan dan sektor industri, sedangkan sektor tradisional berada di pedesaan dan sektor tradisional. Sementara

kesenjangan regional adalah kesenjangan antara Katimin (Kawasan Timur Indonesia) dan Kabarin (Kawasan Barat Indonesia). Sedangkan kesenjangan menurut etnis yaitu kesenjangan antara pribumi dan non – pribumi.

Otonomi daerah benar – benar diarahkan pada optimalisasi manfaat yang akan diterima oleh masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Jika otonomi tidak dilaksanakan dengan pertimbangan – pertimbangan tadi, atau rendahnya komitmen serta kesiapan daerah dalam melaksanakan otonomi tersebut, bukanya akan menimbulkan efek positif dalam melaksanakan pemberdayaan ekonomi daerah, tetapi justru mengancam kondisi perekonomian secara keseluruhan.

2.1.4 Pembangunan dengan pemerataan

Perubahan ekonomi disamping mengejar laju pertumbuhan ekonomi juga harus memperhatikan aspek pemerataan. Ada dua argumen yang berhubungan dengan masalah pembangunan ekonomi dengan pemerataan (Todaro, 2000)

a. Argumen Tradisional

Argumen tradisional memfokuskan lebih dalam pengelolaan faktor – faktor produksi, tabungan dan pertumbuhan ekonomi. Distribusi pendapatan yang sangat tidak merata merupakan sesuatu yang terpaksa demi memacu laju pertumbuhan ekonomi secara cepat. Akibat dari pengaruh teori dan kebijakan perekonomian pasar bebas, penerimaan pemikiran seperti itu oleh kalangan ekonom pada umumnya dari negara – negara maju maupun negara berkembang, baik secara implisit maupun

eksplisit menunjukkan bahwa mereka tidak begitu memperhatikan masalah kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan.

Mereka tidak saja menganggap ketidakadilan sebagai syarat yang pantas dikorbankan dalam menggapai proses pertumbuhan ekonomi secara maksimum dan bila dalam jangka panjang hal itu dianggap syarat yang diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk melalui mekanisme persaingan penetesan kebawah (*trickle down effect*) secara alamiah.

b. Argumen Tandingan

Karena terdapat ekonom pembangunan yang merasa bahwa pemerataan pendapatan yang lebih adil di negara – negara berkembang tidak bisa dinomorduakan, karena hal itu merupakan suatu kondisi penting atau syarat yang harus diadakan guna menunjang pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2000). Dalam argumen tersebut terdapat lima alasan yaitu :

Pertama, ketimpangan yang begitu besar dan kemiskinan yang begitu luas telah menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga masyarakat miskin tidak memiliki akses terhadap prolehan kredit. Berbagai faktor ini secara bersama – sama menjadi penyebab rendahnya pertumbuhan GNP per kapita dibandingkan jika terdapat pemerataan pendapatan yang lebih besar.

Kedua, berdasarkan observasi sekilas yang ditunjang oleh data – data empiris yang ada, kita mengetahui bahwa tidak seperti yang terjadi dalam sejarah pertumbuhan ekonomi negara – negara maju, orang – orang kaya di negara – negara dunia ketiga tidak dapat diharapkan kemampuan

atau kesediaanya untuk menabung dan menanamkan dalam perekonomian domestik.

Ketiga, rendahnya pendapatan dan taraf hidup kaum miskin yang berwujud berupa kondisi kesehatannya yang buruk, kurang makan dan gizi dan pendidikannya yang rendah justru akan menurunkan produktivitas ekonomi mereka dan pada akhirnya mengakibatkan rendahnya pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Keempat, upaya – upaya untuk menaikkan tingkat pendapatan penduduk miskin akan merangsang meningkatnya permintaan terhadap barang – barang produksi dalam negeri seperti bahan makanan dan pakaian.

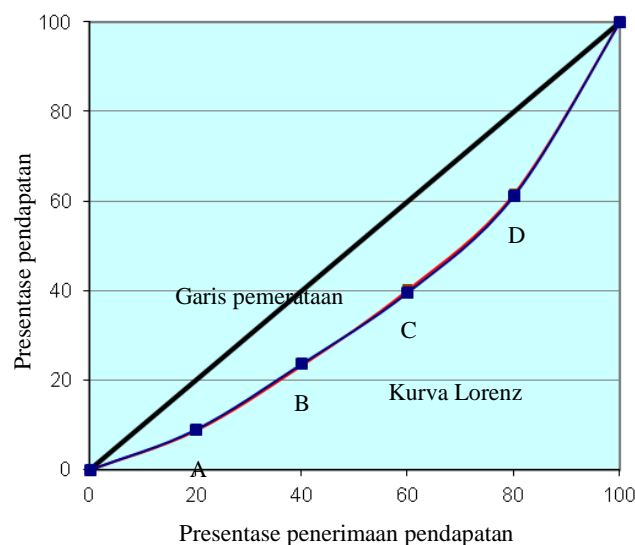
Kelima, dengan tercapainya distribusi pendapatan yang lebih adil melalui upaya – upaya pengurangan kemiskinan masyarakat, maka akan segera tercipta banyak insentif atau rangsangan – rangsangan materiil dan psikologis yang pada gilirannya akan menjadi penghambat kemajuan ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa promosi pertumbuhan ekonomi secara cepat dan upaya – upaya pengentasan kemiskinan serta penanggulangan ketimpangan pendapatan bukanlah tujuan – tujuan yang saling bertentangan sehingga yang satu tidak perlu diutamakan dengan mengorbankan yang lain.

2.1.5 Kurva Lorenz

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan – lapisan penduduk. Kurva Lorenz merupakan metode yang

lazim digunakan untuk menganalisis statistik pendapatan perorangan. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tingkatnya melambangkan presentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi dalamnya mewakili presentase kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata (Lincoln Arsyad, 1997).

Gambar 2.1
Kurva Lorenz



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1.1 diatas menunjukkan mekanisme kerja kurva tersebut. Jumlah penerima pendapatan dinyatakan pada sumbu horizontal, tidak dalam arti absolute melainkan dalam *presentase kumulatif*. Misalnya, pada titik 20 kita mendapati populasi terendah (penduduk yang paling miskin) yang jumlahnya meliputi 20%

dari jumlah total penduduk. Pada titik 60 teradapat 60% kelompok bawah, demikian seterusnya sampai pada sumbu paling ujung yang meliputi 100% atau seluruh populasi atau jumlah penduduk. Sedangkan sumbu vertikal menyatakan bahwa dari pendapatan total yang diminta oleh masing – masing presentase kelompok penduduk tersebut. Sumbu tersebut juga berakhir pada titik 100%, sehingga itu berarti bahwa kedua sumbu (vertikal dan horizontal) sama panjangnya. Gambar ini secara keseluruhan berbentuk bujur sangkar, dan dibelah oleh sebuah garis diagonal yang ditarik dari titik nol pada sudut kiri bawah (titik asal) menuju ke sudut kanan atas. Pada setiap titik yang terdapat pada garis diagonal itu, presentase pendapatan yang diterima *persis sama* dengan presentase jumlah penerimaannya misalnya, titik tengah garis diagonal melambangkan 50% pendapatan yang tepat didistribusikan untuk 50% dari jumlah penduduk. Dengan kata lain garis diagonal pada gambar tersebut melambangkan “peranan sempurna” (*perfect equality*) dalam distribusi ukuran pendapatan. Masing – masing pendapatan kelompok penerimaan pendapatan menerima presentase pendapatan total yang sama besarnya contohnya, 40% kelompok terbawah akan menerima 40% dari pendapatan total, sedangkan 5% kelompok teratas hanya menerima 5% dari pendapatan total.

Kurva Lorenz memperhatikan hubungan kuantitatif *aktual* antara presentase penerima pendapatan dengan prosentase pendapatan total yang benar – benar mereka terima selama misalnya, satu tahun. Gambar tersebut diatas membuat kurva Lorenz yang menggunakan data desil (populasi terbagi menjadi sepuluh kelompok) yang terbuat dalam tabel diatas. Dalam kalimat lain, sumbu

horizontal dan sumbu vertikal dibagi menjadi sepuluh bagian yang sama, sesuai dengan sepuluh kelompok desil. Titik A menunjukkan bahwa 20% kelompok terbawah (termiskin) dari total penduduk hanya menerima 10% pendapatan total, titik B menunjukkan bahwa 40% kelompok terbawah menerima hanya menerima 22% dari pendapatan total, demikian seterusnya bagi masing – masing 4 kelompok lainnya. Perhatikan bahwa titik tengah, yang menunjukkan 50% penduduk hanya menerima 30% dari pendapatan total.

Semakin jauh jarak kurva Lorenz dari garis diagonal (yang merupakan garis pemerataan sempurna), maka semakin timpang atau tidak merata distribusi pendapatannya. Kasus ekstrim dari ketidakmerataan yang sempurna (yaitu, apabila hanya seorang saja yang tidak menerima pendapatan) akan diperhatikan oleh kurva Lorenz yang berhimpitan dengan sumbu horizontal sebelah bawah dan sumbu vertikal disebelah kanan. Oleh karena itu tidak ada satu negara pun yang memperlihatkan pemerataan sempurna atau ketidaksamaan sempurna dalam distribusi pendapatannya, semua kurva Lorenz dari setiap negara akan ada di sebelah kanan garis diagonal seperti yang ditunjukkan gambar diatas. Semakin parah tingkat ketidakmerataan atau ketimpangan distribusi pendapatan disuatu negara, maka bentuk kurva Lorenz-nya pun akan semakin melengkung mendekati subu horizontal bagian bawah.

2.1.6 Indeks Gini atau Rasio Gini

Pendapat atau ukuran berdasarkan koefisien Gini atau Gini ratio dikemukakan oleh *C.GINI* yang melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total

pendapatan. Ukuran Gini Ratio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara 0 sampai dengan 1. Gini Ratio mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Gini Ratio mendekati satu, menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Rumus yang dipakai untuk menghitung Gini Ratio adalah :

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i(Q_i + Q_{i-1})}{10.000}$$

Keterangan :

G = Gini Ratio

P_i = Presentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke-i

Q_i = Presentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas-i

Q_{i-1} = Presentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke-i

k = Banyaknya kelas pendapatan

Nilai Gini berada pada selang 0 sampai 1. Bila nilai gini mendekati satu maka terjadi ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan. Sedangkan semakin kecil atau mendekati nol suatu nilai Gini maka semakin meratanya distribusi pendapatan aktual dan pengeluaran konsumsi. Indeks / Rasio Gini merupakan koefisien yang berkisar 0 sampai 1, yang menjelaskan kadar ketimpangan distribusi pendapatan nasional.

Bank Dunia mengklasifikasikan ketidakmerataan pendapatan berdasarkan tiga lapisan :

- a. 40% penduduk berpendapatan rendah / penduduk termiskin
- b. 40% penduduk berpendapatan menengah
- c. 20% penduduk berpendapatan tinggi

Ketimpangan Parah = distribusi pendapatannya 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati <12% pendapatan nasional

Ketimpangan Sedang = distribusi pendapatannya 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati 12 – 17% pendapatan nasional

Ketimpangan Lunak (Distribusi Merata) = 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati >17% pendapatan nasional

Koefisien Gini merupakan salah satu ukuran yang memenuhi empat kriteria yang sangat dicari, yaitu prinsip anonimitas, independensi skala, independensi populasi, dan transfer. *Prinsip anonimitas (anonymity principle)* mengatakan bahwa ukuran ketimpangan seharusnya tidak tergantung kepada siapa yang mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi, dengan kata lain, ukuran tersebut tidak tergantung pada apa yang kita yakini sebagai manusia yang lebih baik, apakah itu orang kaya atau orang miskin.

Prinsip independensi skala (*scale independence principle*) berarti bahwa ukuran ketimpangan kita seharusnya tidak tergantung ada suatu perekonomian atau negara, atau cara kita mengukur pendapatannya, dengan kata lain, ukuran ketimpangan tersebut tidak tergantung pada apakah kita mengukur pendapatan dalam dolar atau dalam sen, dalam rupee atau dalam rupiah, atau apakah perekonomian negara tersebut secara rata – rata kaya atau miskin, karena jika kita ingin mengukur ketimpangan, kita ingin mengukur sebaran pendapatan, bukan besarnya (meskipun perlu diingat juga bahwa besarnya pendapatan juga sangat penting dalam pengukuran kemiskinan).

Prinsip independensi populasi (*population independence principle*) juga agak mirip dengan prinsip sebelumnya, prinsip ini menyatakan bahwa pengukuran ketimpangan seharusnya tidak didasarkan pada jumlah penerima pendapatan (jumlah penduduk). Misalnya, perekonomian China tidak boleh dikatakan lebih merata atau lebih timpang daripada perekonomian Vietnam hanya karena penduduk China lebih banyak. Akhirnya Koefisien Gini juga memenuhi prinsip transfer (*transfer principle*), yang juga disebut *prinsip Pigou-Dalton*, diambil dari nama penemunya ini mengatakan bahwa, dengan mengasumsikan semua pendapatan yang lain konstan, jika kita mentransfer sejumlah pendapatan dari orang kaya ke orang miskin (namun tidak sangat banyak sehingga mengakibatkan orang miskin itu sekarang justru lebih kaya daripada orang yang awalnya kaya tadi), maka dihasilkan distribusi pendapatan baru yang lebih merata.

2.2 Penelitian Terdahulu

Studi mengenai ketimpangan distribusi pendapatan telah banyak dilakukan. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik tersebut.

1. T. Makmur, Safrida dan Khaesma Jayanthi (2011), dalam penelitiannya berjudul Ketimpangan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Masyarakat Desa di Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Penelitian merupakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana keadaan ketimpangan yang ada di wilayah tersebut pada tahun 2011. Hasil penelitian memberikan gambaran

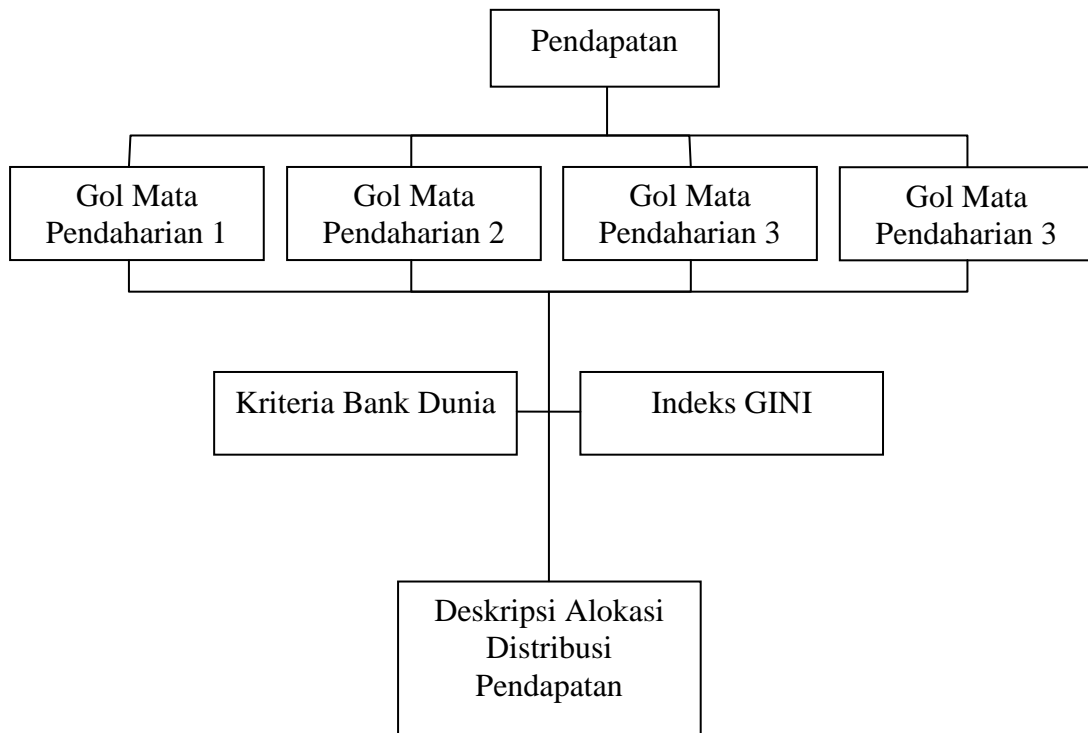
tentang ketimpangan di wilayah tersebut dengan berdasarkan pada kriteria Bank Dunia, Indeks Gini dan juga distribusi dari alokasi pendapatan keluarga.

2. Bosman Pangaribuan (2005), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah Kecamatan di Kabupaten Blora menggunakan Analisis Shift Share, LQ dan Index Williamson untuk mengukur PDRB, PDRB/kapita, jumlah penduduk, sektor basis, sektor non basis. Menurut Bosman berdasarkan analisis Indeks Williamson, Kabupaten Blora dapat dikatakan mengalami pemerataan tingkat pendapatan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka serta penelitian – penelitian terdahulu maka kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi ketimpangan pendapatan dan alokasi pendistribusian pendapatan oleh keluarga di wilayah Kota Surakarta. Secara sederhana kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



Ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang dihitung menggunakan Indeks Gini. Semakin kecil (mendekati nol) koefisiennya, pertanda semakin baik atau merata distribusi. Di lain pihak, koefisien yang kian besar (semakin mendekati satu) mengisyaratkan distribusi yang kian timpang atau senjang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Surakarta Kecamatan Banjarsari. Pemilihan lokasi berdasarkan adanya klasifikasi pekerjaan seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS)/TNI/POLRI, Pedagang dan Buruh yang terbagi menjadi Buruh Industri dan Buruh Bangunan. Objek dalam penelitian ini adalah kepala rumah tangga dengan klasifikasi pola mata pencaharian yang berbeda, dengan ruang lingkup penelitian ini, terbatas kepada sumber pendapatan dan pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Adapun Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah Sumber dan besarnya pendapatan, pengeluaran Rumah tangga yang meliputi biaya konsumsi pangan, biaya perlengkapan rumah tangga, biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Variable lainya adalah pendapatan rumah tangga, Analisis Gini Ratio dan Kriteria Bank Dunia.

3.1.2 Definisi Operasional

1. Pendapatan

Besarnya pendapatan dalam penelitian ini diproxi dari besarnya pengeluaran yang dialokasikan oleh masing-masing rumah tangga

kelompok mata pencaharian yaitu rumah tangga PNS/TNI/POLRI, buruh dan pedagang.

2. Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga adalah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, mulai dari pangan, rumah tangga, biaya sekolah dan biaya kesehatan.

a. Biaya Konsumsi Pangan

Biaya konsumsi pangan adalah biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk keperluan makan dan minum seperti beras, lauk – pauk, sayuran serta makanan dan minuman jadi.

b. Biaya Perlengkapan Rumah Tangga

Biaya perlengkapan rumah tangga adalah biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk keperluan membayar rekening listrik, barang tahan lama, pakaian dan alas kaki serta membayar sewa rumah bagi yang menyewa rumah.

c. Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan adalah biaya yang dikeluarkan oleh kepala rumah tangga untuk keperluan pendidikan seperti biaya sekolah dan kuliah serta membeli alat tulis dan buku bacaan untuk keperluan pendidikan.

d. Biaya Kesehatan

Biaya kesehatan adalah biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk keperluan medis seperti berobat ke dokter atau

bidan dan untuk membeli obat di apotik serta keperluan medis lainnya.

3. Indeks Gini atau Gini Ratio adalah alat untuk menghitung hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. Ukuran Gini Ratio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara 0 sampai dengan 1. Gini Ratio mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Gini Ratio mendekati satu, menunjukkan ketimpangan yang tinggi.

4. Kriteria Bank Dunia

Bank Dunia mengklasifikasikan ketidakmerataan berdasarkan tiga lapisan :

- a. 40% penduduk berpendapatan terendah
- b. 40% penduduk berpendapatan menengah
- c. 20% penduduk berpendapatan tinggi

3.2 Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan data jenis primer dengan metode wawancara yaitu data yang bersumber pada hasil jawaban atas kuisisioner atau wawancara yang dilakukan dengan materi yang terkait dengan penelitian ini. Adapun sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kecamatan Banjarsari kota Surakarta tahun 2012, Internet, Jurnal dan Penelitian Terdahulu, dan literatur – literatur yang terkait dengan penelitian ini.

3.3 Metode Pengambilan Sampel

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dengan menggunakan metode survey. Pengambilan sampel dilakukan secara acak bertingkat. Pertama dipilih kelurahan sampel dengan acak sederhana (*simple random sampling*) dengan menggunakan rumus Slovin. Sampel dipilih di 3 kelurahan yaitu Sumber, Nusukan dan Kadipiro dengan perincian populasi sebagai berikut :

Tabel 3.1
Populasi Penelitian

Kelurahan	Buruh (Industri & Bangunan)	Pedagang	PNS/TNI/ POLRI	Jumlah
Sumber	1926	623	758	3307
Nusukan	9383	1626	526	11535
Kadipiro	11506	2979	1381	15866
Total	22815	5228	2665	30708

Sumber : BPS, 2012

Dengan menggunakan rumus Slovin maka diperoleh jumlah sampel sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Nd^2}$$

Dengan menggunakan tingkat kesalahan 10% ($d = 0,10$) maka diperoleh sampel sebesar :

$$n = \frac{30708}{1 + (30708)(0,1)^2} = 99,68 \text{ dibulatkan menjadi } 100 \text{ orang}$$

Kemudian sampel terpilih ditetapkan sebesar 20% berdasarkan klasifikasi pola mata pencaharian (PNS/TNI/POLRI, Pedagang, Buruh). Karena proporsi populasi kurang ideal untuk penelitian maka jumlah sampel ditentukan dengan jumlah berikut :

PNS/TNI/POLRI = 20 sampel

Pedagang = 25 sampel

Buruh = 55 sampel

3.4 Metode Analisis

Perhitungan ketimpangan distribusi pendapatan dalam penelitian ini menggunakan metode perhitungan indeks Gini dan Kriteria Bank Dunia.

1. Indeks GINI Ratio

Gini ratio merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal dan kurva Lorenz (daerah A) dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal.

Rumus untuk menghitung gini ratio :

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i(Q_i + Q_{i-1})}{10.000}$$

Keterangan :

G : Gini Ratio

P_i : presentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i

Q_i : presentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai

kelas ke-i

Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika :

- $G < 0,3$ = ketimpangan rendah
- $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang
- $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi

2. Analisis dengan Kriteria Bank Dunia

Bank Dunia mengklasifikasikan ketidakmerataan berdasarkan tiga lapisan :

- d. 40% penduduk berpendapatan terendah
- e. 40% penduduk berpendapatan menengah
- f. 20% penduduk berpendapatan tinggi

Klasifikasi :

Ketimpangan Tinggi :

Distribusi pendapatnya 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati <12% pendapatan nasional.

Ketimpangan Sedang :

Distribusi pendapatnya 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati 12 – 17% pendapatan nasional.

Ketimpangan Rendah (distribusi merata) :

40% penduduk berpendapatan rendah menikmati >17% pendapatan nasional.